

**TATA KELOLA ASET PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH
DAERAH DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN TANAH JAWA
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020-2021**

Oleh : Bakti Ibrani Exaudi Sihombing

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Traditional markets are one of the government assets that must be managed based on Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property. The problems found in the field are traditional market dysfunction and lack of management resulting in fatal damage to traditional market assets. The aim of this research is to analyze the principles of government asset management carried out by the Tanah Jawa District Government in managing traditional market assets in Tanjung Pasir village, Tanah Jawa District in 2020-2021.

This research uses the theory of government asset governance according to Sholeh and Rochmansjah because there are seven principles, namely: clear and transparent ownership, effective asset management, use of appropriate technology, minimizing risk, community involvement, accountability, monitoring and evaluation. This research method uses a qualitative approach by obtaining data from interviews and documentation.

The results of this research indicate that traditional markets have not functioned effectively. However, the Tanah Jawa sub-district government is still trying to utilize traditional market assets such as community entertainment venues, traditional party venues and voting venues to support more useful uses. Factors inhibiting the management of traditional market assets are resistance from the community and traders because the location of the traditional market is far from the meeting point of routes between villages, the traditional market area feels narrow, and access to the traditional market in and out is only available in one lane.

Keywords: *Governance, Government Assets, Traditional Markets*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Aset daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Aset/barang berwujud seperti tanah, bangunan, mesin, alat kendaraan dan lain lain. Sedangkan aset/barang tidak berwujud seperti hak paten, hak guna bangunan, hak sewa dan lain lain. Pemerintah daerah dituntut dapat mengelola aset secara efektif dan efisien dalam perencanaan, pengelolaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi sumber potensi penerimaan daerah dan menambah pendapatan asli daerah (Aituarauw, 2021). Aset daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun dalam hal ini, khususnya bidang aset daerah atas pasar tradisional masih belum melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasar tradisional adalah tempat pusat kegiatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berbentuk toko, kios, los dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari dengan ciri relasi yang khas dalam proses tawar menawar antara konsumen dan produsen. Kecamatan Tanah Jawa memiliki 2 pasar tradisional yakni di Kelurahan Pematang Tanah Jawa dan di Desa Tanjung Pasir. Berdasarkan jumlah pasar tradisional di Kecamatan Tanah Jawa, maka peneliti menfokuskan penelitian pada Pasar/Pajak Baru yang terletak di desa Tanjung Pasir. Hal ini

dikarenakan pasar tradisional tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Pasar tradisional juga masih kurang mendapat perhatian terhadap pemeliharaan sebagaimana mestinya dalam pengelolaan barang milik daerah. Akibatnya terjadi kerusakan fatal pada fasilitas konstruksi bangunan yang saat ini tidak layak pakai lagi. Selain itu juga lingkungan pasar tradisional tidak dilakukan perawatan sehingga menimbulkan semak belukar yang memperlihatkan pasar tersebut tidak dipelihara dengan baik (Marpaung, 2022).

Permasalahan lain adalah pencemaran lingkungan sekitar akibat timbunan sampah. Banyaknya timbunan sampah pada lahan sekitar pasar dikarenakan lahan pasar sudah beralih menjadi Tempat Pembuangan Akhir sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Banyaknya sampah mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar dan memberikan efek buruk warga sekitar karena merasa tidak nyaman dan terganggu dengan aroma busuk yang ditimbulkan sampah. Keluhan warga telah disampaikan kepada pemerintah setempat namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas terkait permasalahan tersebut (Marpaung, 2022).

Melihat kondisi permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis pada pasar tradisional di desa Tanjung Pasir yang sangat memprihatkan, tentu tidak sesuai dengan siklus kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang tertuang ke dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dalam hal ini barang milik daerah adalah pasar tradisional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Kelola Aset Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Daerah di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2021?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam Tata Kelola Aset Pasar Tradisional Oleh Pemerintah di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2021?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Aset Pasar Tradisional oleh Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa terhadap pasar tradisional desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Tata Kelola Aset Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2021.

Kajian Teori

Tata kelola aset pemerintahan menurut Sholeh dan Rochmansjah dalam (Wicaksono, 2018) dijelaskan sebagai serangkaian prinsip dan praktik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola aset-asetnya dengan baik dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan

strategis organisasi. Beberapa prinsip yang menjadi hal penting dalam tata kelola aset pemerintahan antara lain:

1. Kepemilikan yang jelas dan transparan

Pemerintah harus memiliki informasi yang jelas tentang aset-asetnya dan harus menetapkan kebijakan yang transparan dalam mengelola aset-aset tersebut.

2. Pengelolaan aset secara efektif

Pemerintah harus mengelola aset-asetnya secara efektif dengan memastikan bahwa aset tersebut dimanfaatkan seoptimal mungkin, dikelola dengan baik, dan dilindungi dari kerusakan atau hilang.

3. Penggunaan teknologi yang tepat

Pemerintah harus menggunakan teknologi yang tepat untuk memantau, mengelola, dan melindungi aset-asetnya.

4. Meminimalkan risiko

Pemerintah harus meminimalkan risiko terkait dengan pengelolaan aset-asetnya, termasuk risiko keamanan, risiko kerusakan atau kehilangan, dan risiko keuangan.

5. Keterlibatan masyarakat

Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan aset-asetnya, termasuk melalui penggunaan forum atau konsultasi publik untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik dari masyarakat.

6. Akuntabilitas

Pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan aset-asetnya dan

harus mempertanggungjawabkan penggunaan aset-aset tersebut kepada publik.

7. Pengawasan dan evaluasi

Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan aset-asetnya secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip tata kelola aset pemerintahan telah diikuti dengan baik dan efektif.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang artinya menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan dan dilengkapi dengan penjelasan tentang bagaimana Tata Kelola Aset Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan yang jelas dan transparan

Kepemilikan yang jelas dan transparan merupakan suatu indikator dalam penentuan transparansi pengelolaan aset kepada pemerintah dan juga masyarakat. Pengelolaan aset yang dikelola juga harus jelas baik dari segi informasi tentang aset, anggaran, dan pengeluaran perlu tersedia untuk masyarakat umum sehingga dapat

terlibat dalam pengawasan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa yang mengadakan aset dan kepemilikan aset pasar tradisional tersebut merupakan milik pemerintah daerah Kabupaten Simalungun yang mana sertifikat kepemilikannya dipegang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun namun pengguna barang dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kecamatan Tanah Jawa.

Pengelolaan aset secara efektif

Pengelolaan aset secara efektif mengacu pada cara pelaksanaan pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kekayaan yang dimiliki. Hal tersebut melibatkan sejumlah prinsip dan praktik yang dirancang untuk mencapai tujuan pemerintah dan untuk mendukung kepentingan masyarakat dengan cara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna menciptakan prinsip penting dalam menjalankan prinsip tata kelola aset pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Pengelolaan aset pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa belum mencapai tujuan yang efektif karena adanya pasar tradisional belum difungsikan secara merata dan konsisten dipergunakan sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat. Namun dalam hal tersebut Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa berupaya memaksimalkan aset pasar tradisional dengan memanfaatkan ke berbagai kegiatan yang dilakukan dilingkungan pasar tradisional tersebut. Berikut data pemanfaatan aset pasar tradisional di desa Tanjung

Pasir Kecamatan Tanah Jawa selama tahun 2020-2021

**Data Pemanfaatan Aset Pasar Tradisional di Desa Tanjung Pasir
Kecamatan Tanah Jawa Tahun 2020-2021**

No	Aset pasar tradisional yang digunakan	Kegiatan	Pengguna	Tahun	Sebanyak
1.	Lahan Luar&Dalam Pasar Tradisional	Pertanian	Masyarakat Setempat	Sampai sekarang	-
2.	Lahan Depan Pasar Tradisional	Pasar Malam	Swasta	2020;2021	2 kali
3.	Bangunan dan Lahan Pasar Tradisional	Perdagangan Lembu	Kelompok Tani Suka Makmur	2020	1 kali
4.	Lahan Depan Pasar Tradisional	Perlombaan 17 Agustus	Pemerintah Desa Tanjung Pasir	2020;2021	2 kali
5.	Lahan Depan Pasar Tradisional	Acara pesta adat	Masyarakat setempat	2020;2021	12 kali
6.	Lahan depan Pasar tradisional	Pemilihan Kepala Desa	Panitia Pemilihan Kepala Desa	2020	1 kali
7	Lahan depan pasar tradisional	Pemilihan Bupati	KPU Kabupaten	2020	1 kali

Sumber: Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa 2021

Penggunaan teknologi yang tepat

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan aset di instansi pemerintahan merupakan program yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah. Dengan adanya teknologi khusus dalam

pengelolaan aset, pemerintah dan masyarakat dapat sama sama memantau, mengelola, dan melindungi aset aset pemerintah di suatu daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapatkan informasi bahwa Pemerintah

Kecamatan Tanah Jawa masih belum memiliki sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan maupun pemantauan aset pasar tradisional sehingga pengelolaan maupun pemantauan yang dilakukan masih dilakukan secara langsung dengan turun ke objek aset tersebut.

Meminimalkan resiko

Program manajemen resiko dalam pengelolaan aset khususnya pasar tradisional memiliki fungsi yang penting untuk penggunaan aset yang berkepanjangan. Pasar tradisional harus diidentifikasi dan dilakukan manajemen resiko guna menjaga kualitas aset pasar tradisional tetap terjaga baik dari segi resiko kerusakan, resiko kehilangan dan keamanan.

- Resiko kerusakan
Pelaksanaan meminimalkan resiko kerusakan telah dilakukan namun hanya sebatas pembabatan rumput secara berkala jika rumput pada area pasar tradisional telah panjang. Namun pelaksanaan meminimalkan resiko kerusakan seperti perawatan pasar tradisional belum memiliki jadwal yang terorganisir sehingga pelaksanaan perawatan pasar hanya sebatas pemantauan bertahap dan melakukan pembabatan jika rumput pada area pasar tradisional sudah panjang.
- Resiko kehilangan dan keamanan
Dalam meminimalkan resiko kehilangan, Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa bekerjasama dengan pemerintah desa Tanjung Pasir

untuk lebih memaksimalkan resiko kehilangan aset properti pasar tradisional. Namun pelaksanaan pengamanan dalam meminimalkan resiko kehilangan aset pasar tradisional belum berjalan dengan maksimal karena beberapa kali pasar tradisional telah mengalami kehilangan aset seperti seng dan pintu sehingga mengakibatkan pasar tradisional tersebut semakin terbengkalai.

Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan merupakan suatu bentuk implementasi dari sistem demokrasi suatu pemerintahan. Keterlibatan masyarakat juga merupakan suatu poin penting apakah aset pasar tradisional tersebut penting untuk kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa masyarakat ikut dilibatkan dalam proses perencanaan sehingga perencanaan pembangunan pasar tradisional tersebut dapat berlanjut hingga pembangunan berjalan sampai selesai. Disisi lain pemerintah kecamatan juga melibatkan masyarakat dalam perawatan aset pasar tradisional seperti lahan kosong area pasar tradisional untuk dijadikan ladang masyarakat dengan cacatatan sekaligus untuk merawat lahan tersebut agar tidak berubah menjadi hutan rimba.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi pengelolaan aset pasar tradisional. Semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula pengelolaan aset pasar tradisional. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pengelolaan aset pasar tersebut bukan semena-mena pemerintah kecamatan untuk harus mengelola aset pasar tradisional tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat dan para pedagang di kelurahan Pematang Tanah Jawa untuk dipindahkan ke lokasi baru sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dibangunnya aset pasar tradisional tersebut tidak berjalan dengan baik yang menimbulkan disfungsi aset pasar tradisional.

Kurangnya dukungan dan penolakan dari pihak masyarakat dan pedagang mengakibatkan aset pasar tradisional tidak berjalan dengan baik sehingga pengelolaannya pun kurang mendapat perhatian lebih yang mengakibatkan kerusakan fatal pada aset pasar tradisional. Kerusakan tersebut tidak hanya karena kurangnya dilakukan perawatan tetapi juga karena wilayah area depan pasar tradisional berubah menjadi tempat pembuangan akhir sampah.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa

pemerintah kecamatan Tanah Jawa menjadikan area pasar tradisional di Desa Tanjung Pasir sebagai tempat pembuangan akhir sampah untuk sementara waktu karena pada saat itu pemerintah kecamatan Tanah Jawa belum menemukan tempat untuk dijadikan TPA. Penetapan pasar tradisional sebagai TPA juga sudah dikaji dan ditinjau oleh pemerintah kecamatan Tanah Jawa dengan jarak 500 meter untuk mencegah pencemaran lingkungan dan bau busuk yang dihasilkan sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

Pengawasan dan evaluasi

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah pengawasan dilakukan, perlu adanya dilakukan evaluasi agar proses pengelolaan aset pemerintah bisa berjalan dengan efisien dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa Pasar Tradisional tersebut dilakukan pemantauan dan evaluasi yang menghasilkan wacana untuk dikelola kembali aset pasar tradisional tersebut ke berbagai bidang lainnya seperti wacana dialihfungsikan menjadi sekolah pertanian. Namun tidak ada perencanaan dan pelaksanaan yang matang sehingga wacana dialihfungsikannya aset pasar tradisional menjadi sekolah pertanian tidak tercapai dan aset pasar tradisional tersebut tetap terbengkalai tanpa pengelolaan yang efektif.

Faktor-faktor penghambat dalam tata kelola aset pasar tradisional di desa tanjung pasir kecamatan tanah jawa tahun 2020-2021.

Penolakan dari masyarakat dan pedagang

Kurangnya dukungan serta penolakan dari masyarakat dan pedagang terhadap relokasi pasar tradisional ke desa Tanjung Pasir mengakibatkan Aset Pasar Tradisional menjadi kumuh dan kurang dikelola dengan baik. Hal tersebut membuat kerugian aset pemerintah dan dianggap menghamburkan anggaran pemerintah.

Penolakan dari pedagang dan masyarakat untuk dipindahkan ke Pasar tradisional baru di desa Tanjung Pasir karena dinilai kurang strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapatkan informasi bahwa beberapa alasan dinilai kurang strategis antara lain:

- Lokasi tempat pasar tradisional jauh dari titik pertemuan rute jalan antar desa (simpang III) yang dimana jarak berjarak sekitar 1,5 Km dari simpang III sebagai titik pertemuan rute jalan antar desa. Disisi lain, jarak dari jalan umum ke pasar tradisional berjarak sekitra 220 meter sehingga masyarakat dan pedagang merasa terlalu jauh untuk dijangkau.
- Area tradisional di desa Tanjung Pasir yang seluas 25.094 m² dinilai terlalu sempit dibandingkan pasar tradisional yang ada di

kelurahan Pematang Tanah Jawa dengan luas sekitar 36.385 m²

- Akses jalan keluar masuk pasar tradisional hanya tersedia satu jalan sehingga dinilai akan memperlambat pergerakan mobilisasi antar konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tata kelola aset pasar tradisional oleh pemerintah kecamatan Tanah Jawa di desa Tanjung Pasir kecamatan Tanah Jawa Tahun 2020-2021 dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Tata kelola aset pasar tradisional belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari data pengelolaan aset pasar tradisional belum terlaksana secara merata dan konsisten dipergunakan sebagai pasar tradisional. Namun pemerintah kecamatan Tanah Jawa masih berupaya melakukan pemanfaatan aset pasar tradisional tersebut seperti tempat hiburan masyarakat, pasar malam, tempat acara pesta adat, tempat pemilihan suara, dll guna menunjang pemanfaatan yang lebih berguna. Pemerintah kecamatan Tanah Jawa juga belum menggunakan sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan aset khususnya pasar tradisional. Dalam meminimalkan resiko kerusakan pemerintah melakukan pembabatan

rumpun secara berkala sedangkan resiko kehilangan dan keamanan pemerintah melakukan pemantauan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa Tanjung Pasir. Keterlibatan

masyarakat dalam perawatan pasar tradisional dilakukan dengan memberikan izin kepada masyarakat untuk mempergunakan lahan kosong sebagai lahan pertanian dengan memperhatikan perawatan lahan kosong sekitar pasar tradisional. Pengawasan dan evaluasi telah dilakukan pemerintah dengan memperhatikan langsung ke lapangan dan mengevaluasi keadaan pasar untuk segera difungsikan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam tata kelola aset pasar tradisional adalah penolakan dari masyarakat dan pedagang karena lokasi pasar tradisional berada jauh dari titik pertemuan rute jalur antar desa, Area pasar tradisional terasa sempit dibandingkan pasar tradisional di kelurahan Pematang Tanah Jawa, dan akses jalan keluar masuk pasar tradisional hanya tersedia satu jalur.

Saran

Saran yang diberikan penulis agar tata kelola aset pasar tradisional di Desa Tanjung Pasir berjalan dengan baik yaitu:

1. Diharapkan kepada aparat pemerintah kecamatan Tanah Jawa dapat lebih transparan

dan akuntabel dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan aset pasar tradisional di Desa Tanjung Pasir agar proses pengelolaan dapat berjalan lebih maksimal.

2. Diharapkan pemerintah desa Tanjung Pasir dapat lebih memaksimalkan dalam pengamanan aset pasar tradisional agar tidak terjadi lagi kehilangan aset pasar tradisional.
3. Diharapkan masyarakat setempat dapat lebih bekerjasama dengan pemerintah dalam perawatan aset pasar tradisional agar terjaga kualitas aset pasar tradisional dan tidak semakin rusak.

Daftar pustaka

- Andhika, L. R. (2017). *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/867/0>
- Asri, N. (2021). *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12315/>
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group.
- Dewi, A. R. K. (2020). *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Tenaga Kerja Kota*

- Magelang Tahun 2018/2019. 4.*
<https://www.neliti.com/publications/476036/none>
- Fausih, L. L. (2019). *Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo)*.
http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2514/1/LING_LING_FAUSIH.pdf
- Marpaung, R. (2022). *Pembangunan Pekan Tanah Jawa Berubah Menjadi TPA*.
<https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pembangunan-Pekan-Tanah-Jawa-Berubah-Menjadi-TPA>
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nyemas Hasfi, Martoyo, D., & Haryono. (2013). *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Universitas Tarumanegara.
- Purba, R. B. (2019). *Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. 9*.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1054574&val=15786&title=PENGLOLAAN ASET TETAP DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN ASET DAERAH>
- Romlah, S. (2018). *Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016*.
<https://www.neliti.com/publications/206027/pengelolaan-aset-daerah-atas-tanah-milik-pemerintah-daerah-kabupaten-pelalawan-t>
- Rossae, A. (2019). *Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*.
<http://lib.unnes.ac.id/38663/1/3301414090.pdf>
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Revika Aditama.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sulfiani, A. N. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo*.
<http://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/view/59>
- Syamsi, D. M. (2021). *Pemeliharaan aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Tahun 2019* [Universitas Riau].
https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=96296&keywords=Pemeliharaan+aset+Pemerintah+Kabupaten+Kuantan+Singingi+di+Lokasi+Objek+Wisata+Air+Terjun+Guruh+Gemurai+Tahun+2019
- Waristo. (2015). *Pajak Baru Tanah Jawa Simalungun Segera Difungsikan*.
<https://sumut.antaranews.com/berita/146596/pajak-baru-tanah-jawa-simalungun-segera-difungsikan?>
- Wicaksono, I. (2018). *Tata Kelola Pemanfaatan Aset Tetap Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember*.
<http://repository.unmuhjember.a>

- c.id/4532/1/ARTIKEL.pdf
Wita. (2018). *Tata Kelola Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2018* [Universitas Riau].
<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/28030>
- Yolanda, M. R. (2016). *Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh*.
[http://scholar.unand.ac.id/19513/5/SKRIPSI FULL.pdf](http://scholar.unand.ac.id/19513/5/SKRIPSI%20FULL.pdf)
- Yuliana, N. S. (2018). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1455>